

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amran Suadi, 2021, *Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis): Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Prenadamedia Group
- Anisah, S. (2008). *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia: Studi Putusan-putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Total Media.
- Aprita Serlika dan Shalihin Rijalush, 2022, *Hukum Kepailitan Dalam Islam*, cet. 1, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Abdul Manan, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Ascarya, 2017, *Akad dan Produk Bank Syariah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dafira Nughroho Lucky, 2021, *Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia*, Scopindo Indonesia Media Pustaka, Surabaya
- Lubis, S. K., & Wajdi, F. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, A. (2020). *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Jakarta: Kencana.
- Mardhiyaturrositaningsih, *Et,Al.*, 2024, *Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Az zahra Media Society, Sumatera Utara
- Marzuki, P. M. (2011). *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penulisan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Batusangkar
- Munawar, M. (2019). *Harmonisasi Hukum Syariah dalam Sistem Hukum Nasional*. Yogyakarta: UII Press.

Rusli Tami, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, UBL, Bandar Lampung.

Shubhan Hadi, 2019, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Surabaya

Shubhan, 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*.

Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soejono Soekanto. (1984). *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).

Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penulisan Hukum*, Universitas Indonesia-UI Press, Jakarta

Sulaiman, A. (2020). *Peradilan Agama dan Tantangan Regulasi Syariah Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.

Tahir, M. R. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas, Gorontalo

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN No. 131 Tahun 2004, tln No 4443)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (LN No. 36 Tahun 2006, tln No 4594)

Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2008 Tentang Kompleksitas Hukum Ekonomi Syariah

## JURNAL

Widjajati Erna, 2019, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah*, E-journal UIN Jakarta

Ahmad, R., 2015, *Peradilan Agama di Indonesia*. Jurnal Yudisia

Ash-Shiddiqy, 2020, *Analisis Perkembangan Ekonomi dan Perbankan Syariah di Indonesia*.

Haryanti, T., 2013, *Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*

Mona Wulandari, 2022, *Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Kepailitan Syariah di Indonesia*. Jurnal Wajah Hukum.

Mursal, 2016, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam.

Mumpuni Sri Rejeki Niniek, 2022, *Ketidakpastian Proses Pailit Sebagai Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Perkara Bmt Fisabilillah)*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 11, No. 3, 2022

Paongan, R. T., dkk, 2025, *Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mengatasi Konflik Regulasi di Indonesia*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 5(4), 1.

Rahman, A, 2020, *Harmonisasi Hukum Kepailitan dan Ekonomi Syariah*. Jurnal Hukum Islam, 5(2).

Umam, K, 2015, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah*. Jurnal Konstitusi.

## SKRIPSI/THESIS/DISERTASI

Pratama Aditya, “*Kewenangan Mengadili Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah (Taflis) di Indonesia*”, Skripsi Universitas Indonesia, Depok.

Rizqi Fathur, 2021, *Penerapan Hukum Kepailitan pada Akad Syariah di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Legal Certainty*, Tesis UIN Batusangkar, Batusangkar.

## WEBSITE

Mardatillah Aida, “Menakar Efektivitas Perma Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-efektivitas-perma-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-lt6129e03d97013/>,

DSLALAWFIRM, “Pengertian Pengadilan Niaga di Indonesia”, <https://www.dslalawfirm.com/id/pengadilan-niaga-indonesia/>

Fz, “Mengenai Peradilan Agama”, ([https://www.pa-ampana.go.id/arsip-artikel/1352-mengenai-peradilan-agama?utm\\_source](https://www.pa-ampana.go.id/arsip-artikel/1352-mengenai-peradilan-agama?utm_source))

Firma Reza Fajriati, “*Tingkatkan Pengetahuan Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah, A Ditjen Badilag Lakukan Bimtek*”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/tingkatkan-pengetahuan-tentang-lembaga-keuangan-syariah-lks-dan-dewan-pengawas-syariah-dps-relevansinya-dengan-sengketa-ekonomi-syariah-ditjen-badilag-lakukan-bimtek-29-9>,

Kenya swawikanti, <https://www.ruangguru.com/blog/pengertian-ekonomi-syariah-dan-karakteristiknya>,

Siplawfirm, “Sejarah Pembentukan Pengadilan Niaga di Indonesia”,  
<https://siplawfirm.id/pengadilan-niaga-di-indonesia/?lang=id&utm>).

Reni Saptati, “memperkuat infrastruktur ekonomi syariah, mnsejahterahkan masyarakat”,  
<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/memperkuat-infrastruktur-ekonomi-syariah-mensejahterakan-masyarakat>,

Aida Mardatillah, “ Mendorong penyelesaian perkara kepailitan syariah masuk wewenang Pengadilan Agama”,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-penyelesaian-perkara-kepailitan-syariah-masuk-wewenang-pengadilan-agama-lt6138c46912e86/?page=2>

M.Fuad Nasar, "Memperingati 35 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama",  
<https://kemenag.go.id/opini/memperingati-35-tahun-undang-undang-peradilan-agama-OZGCW>

## HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Kebumen Yang  
Mulia Bapak Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.

Hasil wawancara dengan Kurator Bapak Mahyunis, S.H.